



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) DINPERKIM 2017**





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas.....	1
1. Pembentukan.....	1
2. Tugas dan Fungsi.....	3
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Isu Strategis.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2017	7
1. Perjanjian Kinerja (PK)	7
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (PK Eselon III)	7
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	7
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Pencapaian Kinerja Organisasi.....	8
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017	8
2. Capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017	13
3. Perbandingan Capaian Indikator Renstra Tahun 2016 dan 2017.....	15
B. Realisasi Anggaran 2017	16
1. Capaian Perjanjian Kinerja 2017 (Pengukuran Kinerja 2017)	16
2. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja IKU Tahun 2017	19
IV. PENUTUP	20

----- IKHTISAR EKSEKUTIF -----

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas*, maka *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- c) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- d) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- g) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- h) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

- i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah **"TERWUJUDNYA PERUMAHAN PERMUKIMAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIAINYA INFORMASI TATA RUANG YANG TERBUKA DAN AKUNTABEL"**

Hakekat visi diwujudkan dengan 12 (dua belas) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
8. Program Penyediaan Fasilitas Umum;
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
10. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
11. Program Pemanfaatan Ruang;
12. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Pencapaian *realisasi kegiatan* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2017 adalah sebesar **100,00%** sedangkan *realisasi keuangan (96,73%)*. *Sisa keuangan* sebesar **Rp 1.898.449.559,00 (3,27%)** dari *total pagu anggaran Rp 58.024.044.000,00* telah dikembalikan ke kas daerah/tetap di kas daerah.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. ANDRIE SUBANDRIO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580421 199203 1 004



BAB 1

PENDAHULUAN

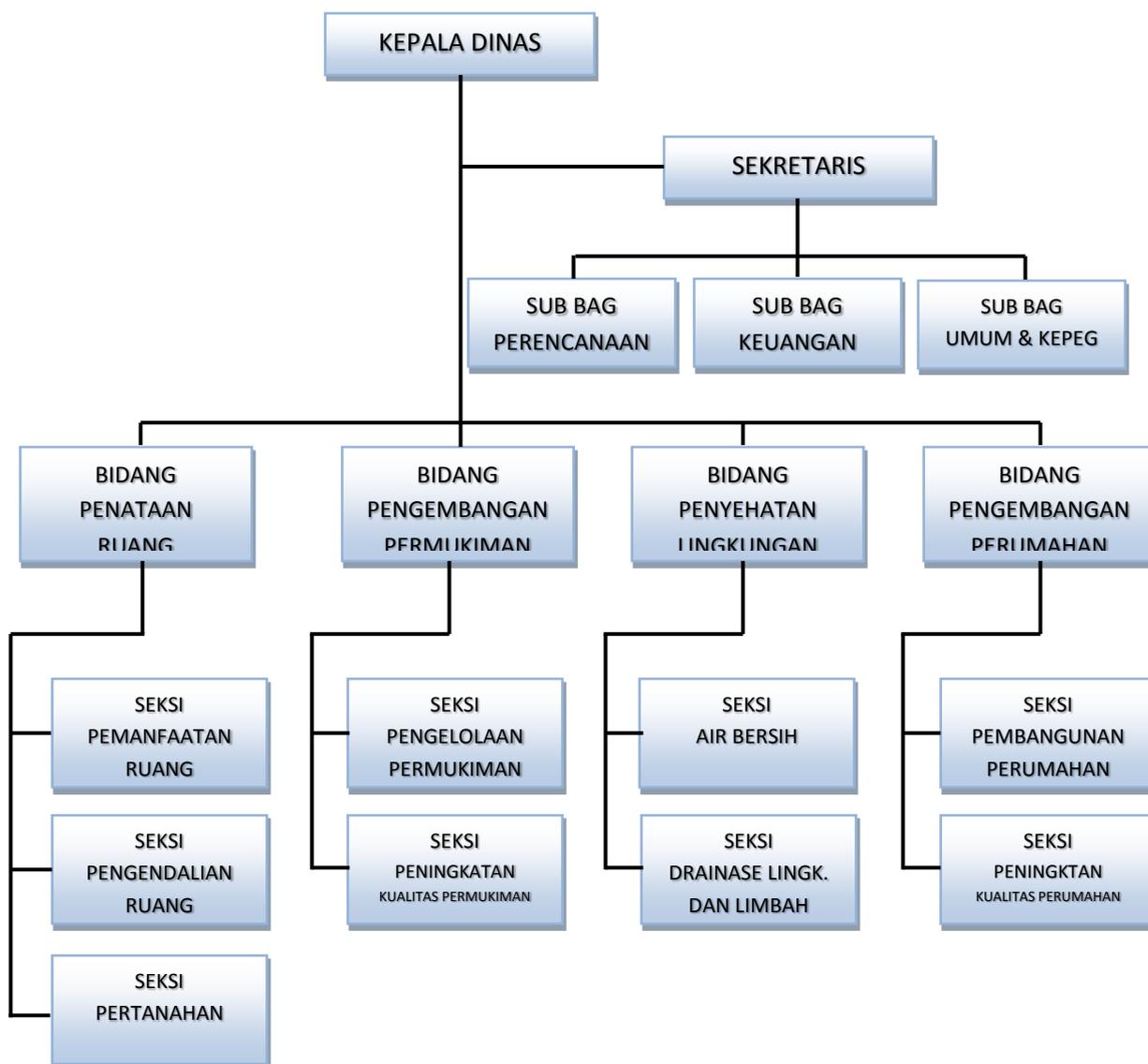
A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas

1. Pembentukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penataan Ruang**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
4. **Bidang Pengembangan Permukiman**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. **Bidang Penyehatan Lingkungan**, terdiri dari :
 - a. Seksi Air Bersih
 - b. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah
6. **Bidang Pengembangan Perumahan**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS :



2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan

b. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 3) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 6) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 7) pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- 8) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut :

1. *Keadaan aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.*

SEKRETARIAT / BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JUMLAH
Kepala Dinas	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	13	5	1	19
Bid. Penataan Ruang	-	5	5	1	11
Bid. Pengembangan Permukiman	-	4	5	-	9
Bid. Penyehatan Lingkungan	-	5	4	1	10
Bid. Pengembangan Perumahan	-	3	4	1	8
JUMLAH	-	30	23	5	58

2. *Keadaan personil menurut eselon*

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 orang
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	4 orang
Eselon IV A	12 orang
JUMLAH	18 ORANG

3. *Keadaan personil menurut pendidikan formal*

PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan setingkat S2	3 orang
Pendidikan setingkat S1/D4	19 orang
Pendidikan setingkat D3	7 orang
Pendidikan setingkat SLTA	25 orang
Pendidikan setingkat SLTP	3 orang
Pendidikan setingkat SD	1 orang
JUMLAH	58 ORANG

C. Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan infrastruktu perumahan dan permukiman tahun 2017-2018 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada kurun waktu 2 tahun mendatang (sisa waktu renstra 2017-2018), yaitu meliputi :

1. *Kawasan Kumuh Perkotaan dan Lingkungan Permukiman yang Layak*

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam, hal ini ditunjukkan dengan indikasi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, salah satunya Perkotaan Purwokerto yang merupakan perkotaan terbesar di Kabupaten Banyumas.

2. *Kebutuhan Masyarakat tentang Informasi Tata Ruang*

Saat ini kemajuan teknologi informasi begitu pesat dan menjadi kebutuhan hampir semua orang. Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh warga negara mengakses informasi dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Konsekuensinya, setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah diwajibkan untuk membuka diri pada publik dan memberikan pelayanan prima kepada mereka yang membutuhkan informasi.

Dewasa ini dinamika pemanfaatan lahan di Kabupaten Banyumas berlangsung relatif cukup pesat yang memicu berbagai pertumbuhan aktivitas dibanyak sektor. Pertumbuhan ini ditandai dengan munculnya banyak bangunan baik berupa bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai wujud pemanfaatan ruang.

Berbagai aktivitas/kegiatan yang memanfaatkan ruang selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu penyediaan informasi tata secara *online*. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tata ruang. Bentuk pelayanan informasi tata ruang diantaranya adalah konsultasi pemanfaatan ruang, dan rekomendasi keterangan rencana darah.

3. *Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (perumahan, sanitasi, air bersih) dan tuntutan penyediaan fasilitas umum*

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai *akses universal* air bersih dan sanitasi.

Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah terutama di daerah perkotaan yang semakin tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang ini sudah mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampa puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan perumahan padat penduduk seperti kawasan perumahan, yang kavling tanahnya kecil-kecil. Kondisi ini berpotensi merusak lingkungan hidup.

Sebagai kebutuhan dasar, air bersih dan sanitasi menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi indikator kemiskinan. Minimya anggaran pada sektor air bersih dan sanitasi apabila disandingkan dengan sektor lainnya misalnya infrastruktur jalan dan irigasi justru menjadi tantangan tersendiri bagi *stakeholder* dalam pembangunan, dan pengembangan layanan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Banyumas.

Demikian juga terhadap penyediaan fasilitas umum untuk infraststruktur permukiman, seperti drainase, saluran air limbah, trotoar pedestrian, penataan makam milik pemerintah juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian karena sangat berhubungan dengan *goals* pencapaian indikator luas permukiman yang tertata. Dalam 2 (dua) tahun kedepan pembiayaan untuk sektor air bersih, sanitasi, trotoar pedestrian dan penyediaan fasilitas umum (infrastruktur perumahan dan permukiman) adalah sebesar Rp. 156.000.000.000 (seratus lima puluh enam milyar rupiah).



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2017

Perencanaan Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017. Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Program dan Kegiatan tahun 2017.

Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017 - 2018 yang disusun setiap lima tahun.

PK dan IKU telah mengalami revisi, dengan Pendampingan langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sedangkan Indikator Revisi RENSTRA juga sudah direvisi sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga ada beberapa Indikator RENSTRA yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas.

PK, PK Eselon, RKT dan IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Target dan Realisasi IKU tahun 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA/SASARAN STRATEGIS	IKU	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	75,37	75,37
		Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	7,98	7,98
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	95,00	98,19
		Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	3,00	2,98

Ada 2 (dua) Sasaran dalam IKU tahun 2017, yaitu :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar.

Untuk mencapai Sasaran 1, ada 2 (dua) Indikator yang mendukungnya, yaitu ***Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar*** dan ***Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata***.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Pencapaian IKU **“Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar”** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar **75,37%**, ini artinya rumah sehat sesuai standar di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 336.152 rumah dari keseluruhan rumah yaitu 446.003 (*data BPS, dan Susenas 2016*).

Khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 telah ditangani sebanyak 3.578 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program BPS Kementerian PUPR	302 rumah
2. Program RTLH Provinsi Jawa Tengah	718 rumah
3. Program RTLH APBD Kabupaten Banyumas	681 rumah
4. Basnas	301 rumah
5. Bank Jateng	99 rumah
6. REI	5 rumah
7. Desa/Kelurahan Anggaran Mandiri	1.472 rumah

Jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 109.851 rumah (*sampai akhir tahun 2017*).

Permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian indikator antara lain, anggaran untuk program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD masih minim dan terjadinya perubahan data dasar (PBDT/Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memberikan *support* anggaran yang memadai untuk program penanganan RTLH dan harus melakukan pemutakhiran mandiri berbasis data terpadu.

Pencapaian IKU **“Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata”** sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar **7,98%**, ini artinya luas area permukiman tertata di Kabupaten Banyumas sudah mencapai *1.514 hektar* dari luas area permukiman keseluruhan yaitu sebesar *18.973,43 hektar*.

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2017

Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,37	75,37	100
2	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	7,98	7,98	100

Sasaran 2 :**Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman**

Untuk mencapai Sasaran 2, ada 2 (dua) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang*** dan ***Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang***.

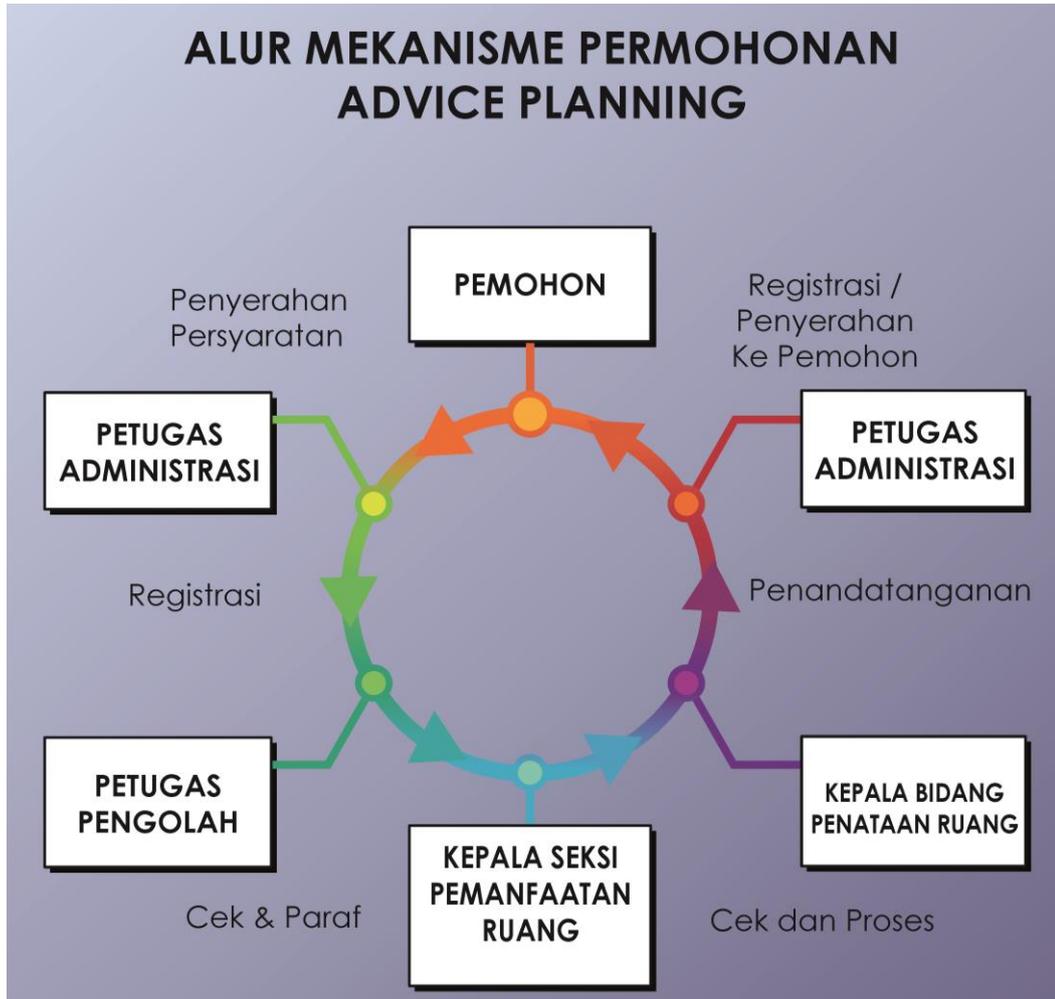
Pencapaian IKU ***“Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang”*** sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar **98,19%**, ini artinya jumlah advice planning yang sesuai tata ruang di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak **1.679 pemohon** dari jumlah keseluruhan permohonan yaitu **1.710**.

Sedangkan Pencapaian IKU ***“Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang”*** sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar **2,98%**, ini artinya Jumlah pelanggaran tata ruang di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak **51 pelanggaran** dari jumlah keseluruhan permohonan yaitu **1.710**.

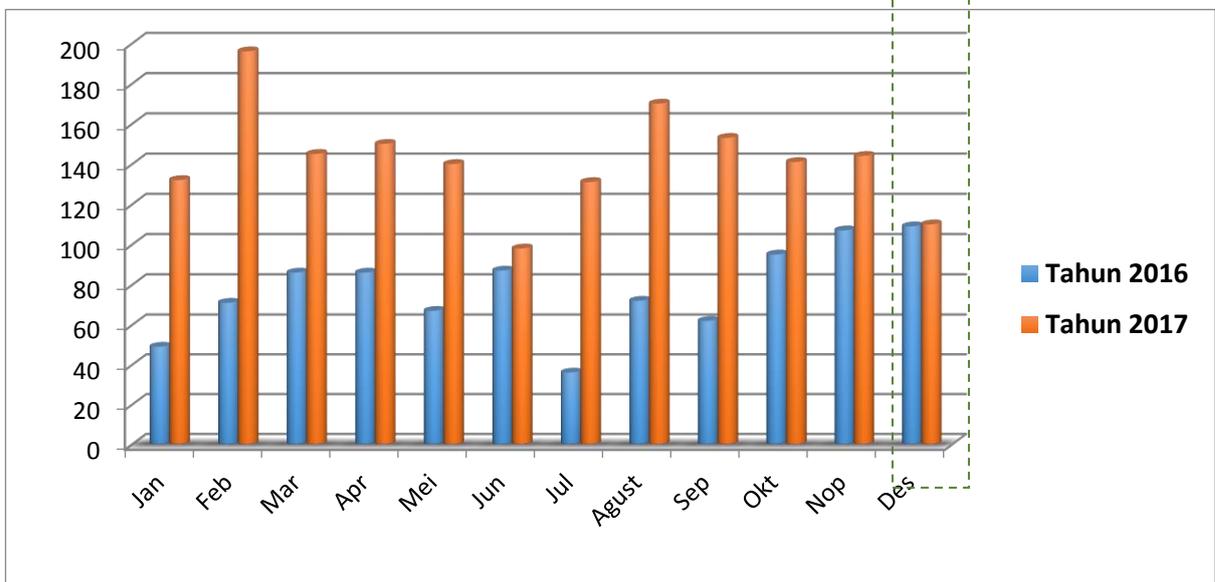
Keterangan Rencana Daerah (KRD)/*Advice Planning* adalah satu dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Banyumas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, *Advice Planning* adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.

Advice Planning berisi :

1. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. KDB maksimum yang diizinkan;
6. KLB maksimum yang diizinkan;
7. KDH minimum yang diwajibkan;
8. KTB maksimum yang diizinkan; dan
9. Jaringan utilitas kota.



**JUMLAH PERMOHONAN ADVICE PLANNING BERDASARKAN BULAN
TAHUN 2016 & 2017**



Ket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
2016	49	71	86	86	67	87	36	72	62	95	107	109
2017	132	196	145	150	140	98	131	170	153	141	144	110

Ket	Jan	s/d Feb	s/d Mar	s/d Apr	s/d Mei	s/d Jun	s/d Jul	s/d Agust	s/d Sep	s/d Okt	s/d Nop	s/d Des
2016	49	120	206	292	359	446	482	554	616	711	818	927
2017	132	328	473	623	763	861	992	1162	1315	1456	1600	1.710

Keterangan :

1. Advice Planning Desember 2017 sebanyak 110 Permohonan
2. Total Advice Planing dari Januari s/d Desember 2017 adalah 1.710 Permohonan

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2017

Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	95	98,19	103
2	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	3	2,98	99

Grafik 1 :



2. Capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017

Capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat dilihat pada Perbandingan Target dan Realisasi RKT Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017
1	Meningkatnya akses rumah tangga pengguna air bersih	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	56,73	62,05	57,03	70,54
2	Meningkatnya akses penduduk pengguna air bersih	Penduduk Berakses Air Minum	58,24	69,10	58,82	71,50
3	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi	Rumah Tangga Bersanitasi	40,57	40,26	40,97	64,50
4	Meningkatnya kualitas permukiman	Lingkungan Permukiman Kumuh	6,59	6,20	6,46	6,34
5	Meningkatnya kualitas permukiman	Luas Permukiman yang Tertata	7,48	7,65	7,98	7,98
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rumah Layak Huni	88,06	88,12	88,26	88,16
7	Meningkatnya lahan milik pemkab yang bersertifikat	Luas Bidang Bersertifikat	0,00	0,00	83,96	85,20
8	Meningkatnya penyelesaian izin lokasi	Penyelesaian Izin Penetapan Lokasi	0,00	0,00	5,00	5,00

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata *Capaian Sasaran* dan *Indikator Kinerja* RKT tahun 2017 mencapai 100%, kecuali *Luas Permukiman Kumuh* yang trendnya menurun dengan realisasi 6,34 %.

Luas kawasan permukiman kumuh perkotaan Purwokerto berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas No. 491 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyumas adalah seluas 274,80 Hektar, dari luas wilayah Perkotaan Purwokerto 3.866 Hektar.

Dalam rangka meminimalisir permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU ini diharapkan dapat mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program KOTAKU adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun 2015 - 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional.

Penataan kawasan kumuh perkotaan Purwokerto melalui keterpaduan program/kegiatan dan sinergitas sektor-sektor yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman.

Sampai akhir tahun 2016 realisasi penanganan kawasan kumuh telah mencapai **6,34%** dari target **6,59%** atau seluas **29,56 hektar** sudah tertata sedangkan target akhir renstra adalah **6,33%** (*trend menurun*).

Permasalahan yang timbul dari pencapaian indikator ini adalah luas permukiman kumuh perkotaan Purwokerto sebanyak 274,8 hektar tidak sebanding dengan biaya penanganan permukiman kumuh. Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini maka penanganan permukiman kumuh harus ditangani secara komprehensif, lintas sektor dan didukung anggaran yang memadai serta adanya komitmen dari pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif).

Grafik 2 :

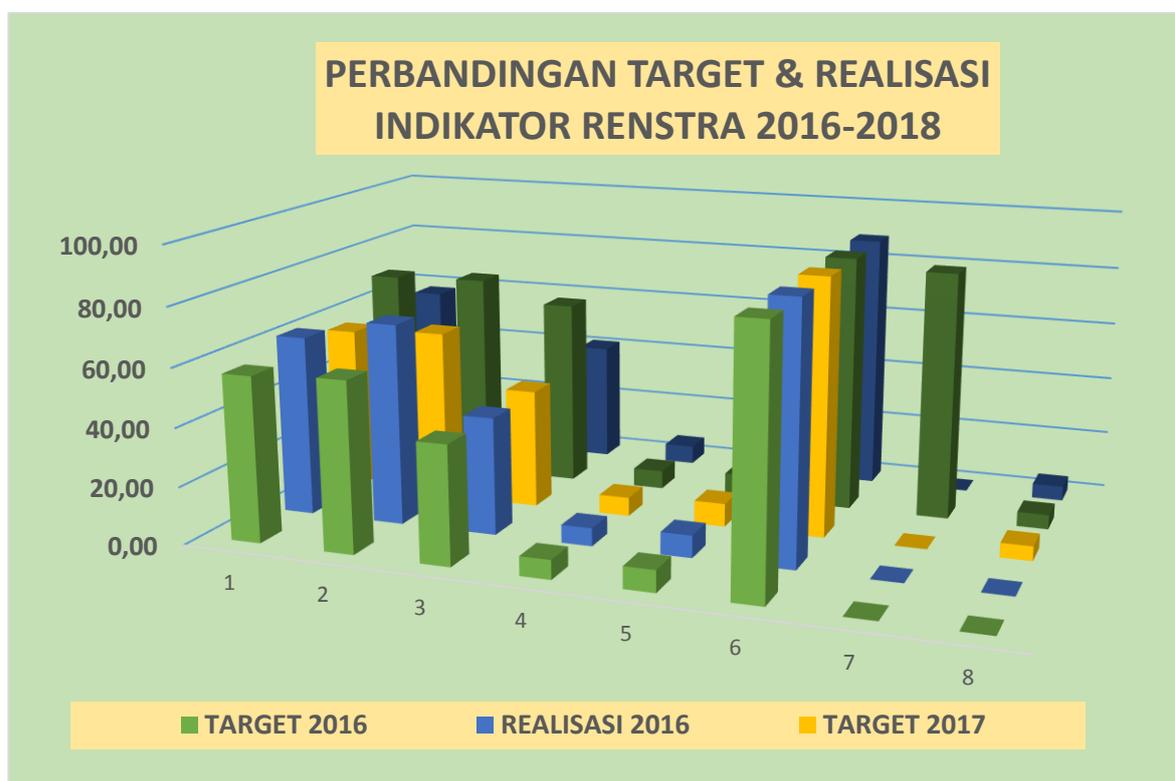


3. Perbandingan Capaian Indikator Renstra Tahun 2016,2017 Terhadap Target Indikator Revisi Renstra 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	TARGET 2018
1	Meningkatnya akses rumah tangga pengguna air bersih	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	56,73	62,05	57,03	70,54	57,86
2	Meningkatnya akses penduduk pengguna air bersih	Penduduk Berakses Air Minum	58,24	69,10	58,82	71,50	59,40
3	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi	Rumah Tangga Bersanitasi	40,57	40,26	40,97	64,50	41,37
4	Meningkatnya kualitas permukiman	Lingkungan Permukiman Kumuh	6,59	6,20	6,46	6,34	6,33
5	Meningkatnya kualitas permukiman	Luas Permukiman yang Tertata	7,48	7,65	7,98	7,98	8,48
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rumah Layak Huni	88,06	88,12	88,26	88,16	88,46
7	Meningkatnya lahan milik pemkab yang bersertifikat	Luas Bidang Bersertifikat	0,00	0,00	83,96	85,20	84,34
8	Meningkatnya penyelesaian izin lokasi	Penyelesaian Izin Penetapan Lokasi	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Capaian Sasaran dan Indikator Renstra Tahun 2016 dan 2017 terhadap target tahun 2018 sudah tercapai (melebihi target).

Grafik : 3



B. Realisasi Anggaran 2017

Realisasi anggaran dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja tahun 2017 yang merupakan realisasi dari target Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bupati Banyumas yang disusun pada awal tahun (dalam hal ini tertanggal Agustus 2017, karena ada Revisi PK)

1. Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2017 (Pengukuran Kinerja tahun 2017)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1 Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,37	75,37
		2 Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	7,98	7,98
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	3 Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	95,00	98,19
		4 Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	3,00	2,98

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	969.018.000	905.122.390
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	499.000.000	478.693.326
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.000.000	138.576.000
4	Pengembangan Perumahan	298.730.000	188.416.705
5	Lingkungan Sehat Perumahan	2.909.500.000	2.583.246.079
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	12.890.000.000	12.760.060.000
7	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.661.528.000	2.334.564.242
8	Penyediaan Fasilitas Umum	3.083.986.000	2.799.116.138
9	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	31.207.282.000	30.692.375.131
10	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.800.000.000	2.746.346.600
11	Pemanfaatan Ruang	420.000.000	382.430.697
12	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	130.000.000	116.647.133
JUMLAH (Rp)		58.024.044.000	56.125.594.441
Persentase (%)		100	96,73

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi anggaran terbesar dari 2 (dua) Program dengan anggaran dan realisasi terbesar pertama adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dengan anggaran 31,2 milyar rupiah terealisasi sebesar 30,6 milyar.

Output dari kegiatan adalah jumlah volume Infrastruktur Perkotaan (jalan, drainase, talud, dan tembok keliling) yang dibangun/dipelihara dengan baik seluas 304.088 meter persegi. Sedangkan Outcomenya adalah meningkatnya kualitas fisik jalan dan lingkungan di daerah perkotaan, untuk menunjang ekonomi kerakyatan.

Kemudian disusul *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong* dengan anggaran 12,8 milyar rupiah terealisasi sebesar 12,7 milyar rupiah. Output kegiatan ini adalah jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dibangun dengan baik sebanyak 99 lokasi meliputi :

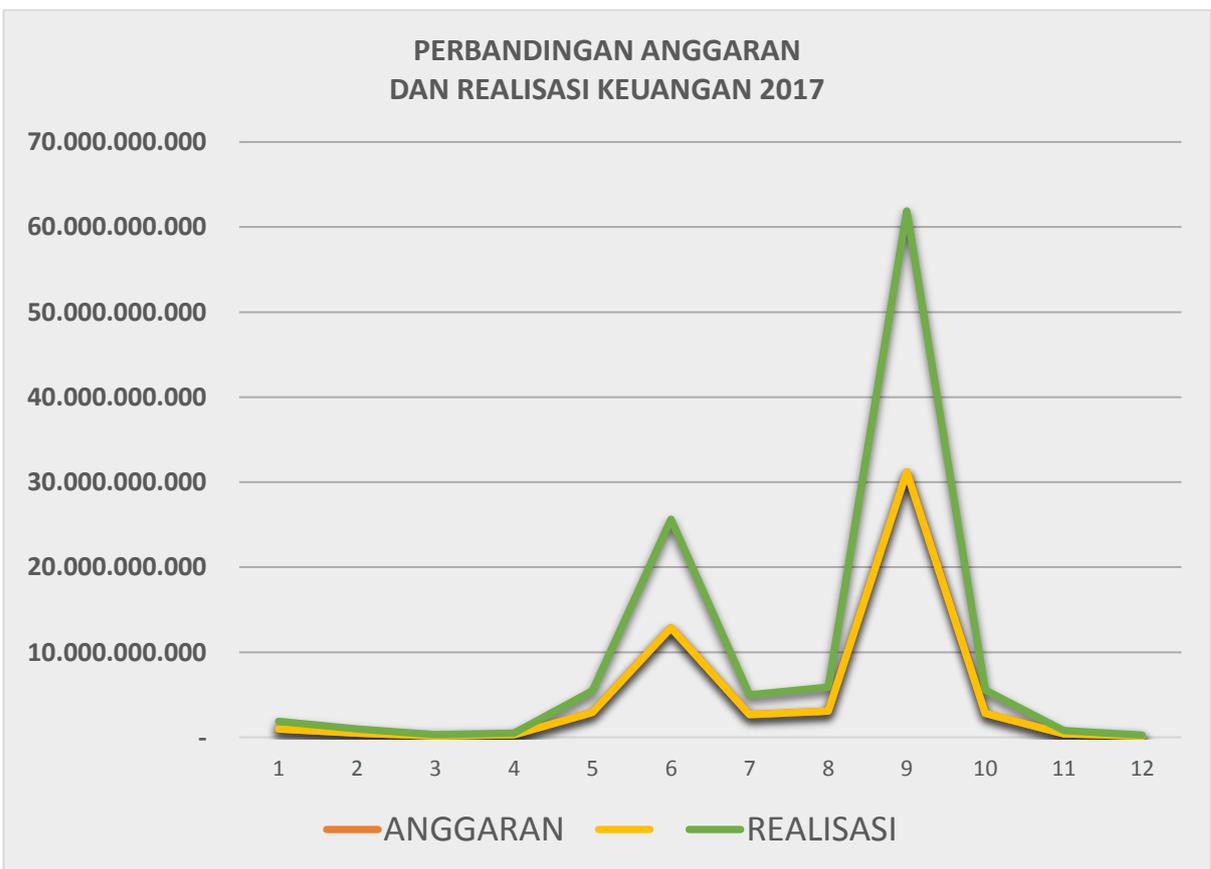
- > 2 Lokasi di Kec Karanglewas
- > 30 Lokasi di Kec Purwokerto Selatan
- > 1 Lokasi di Kec Cilongok
- > 8 Lokasi di Kec Sumpiuh
- > 33 Lokasi di Kec Purwokerto Barat
- > 9 Lokasi di Kec Purwokerto Timur
- > 11 Lokasi di Kec Purwokerto Utara
- > 2 Lokasi di Jalan Kabupaten
- > 1 Lokasi di Kec Kembaran
- > 1 Lokasi di Kec Ajibarang
- > 1 Lokasi di Kec wangon

Sedangkan Outcomenya adalah meningkatnya kualitas fisik saluran drainase untuk mengurangi genangan air hujan (di tepi jalan maupun di permukiman).

Grafik : 4



Grafik : 5



Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja IKU Tahun 2017 Dinas perumahan dan kawasan permukiman											
No	Sasaran	Indikator	Sat	Kinerja			Keuangan				
				Target	Real	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Perumahan Permukiman yang Sehat dan Tertata Sesuai Standar	1.1 Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,37	75,37	100.00	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	298.730.000	67.720.525	22.67
							2	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2.909.500.000	2.308.926.474	79.36
							3	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	12.890.000.000	12.760.060.000	98.99
							4	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	2.661.528.000	2.193.325.658	82.41
							5	PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM	3.083.986.000	2.799.116.138	90.76
							6	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	31.207.282.000	30.692.375.131	98.35
		1.2	Persentase Luas Area Permukiman yang Tertata	%	7,98	7,98	100.00	7	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	2.800.000.000	2.746.346.600
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						100.00	TOTAL PER SASARAN		55.851.026.000	53.567.870.526	95.91
TINGKAT EFISIENSI 4.09 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 104.26 %											
2	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi Tata Ruang dan Perumahan Permukiman	2.1 Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	95	98,19	103.00	8	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	420.000.000	173.633.839	41.34
							9	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	130.000.000	116.647.133	89.73
		2.2	Menurunnya Persentase Pelanggaran Tata Ruang	%	3	2,98	99.00	RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR			
						101.00	TOTAL PER SASARAN		550.000.000	290.280.972	52.78
TINGKAT EFISIENSI 48.22 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 191.37 %											
							TOTAL KESELURUHAN	56.401.026.000	53.858.151.498	95.49	



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102.04 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan meskipun tidak signifikan namun prestasi ini cukup menggambarkan kinerja OPD yang efektif, efisien. Demikian juga dengan penyerapan anggaran dan pencapaian progres fisik telah tercapai sesuai dengan schedule yang ditetapkan, yaitu **realisasi kegiatan** tercapai sebesar **100,00%** sedangkan **realisasi keuangan 96,73%** dari **total pagu anggaran Rp 58.024.044.000,00** dan **Sisa keuangan** sebesar **Rp 1.898.449.559,00 (3,27%)** telah dikembalikan ke kas daerah/tetap di kas daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2017. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang.

Purwokerto, 29 Desember 2017

KERALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN BERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
DINPERKIM
Dr. ANDRIE SUBANDRIO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580421 199203 1 004